



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

TAHUN 2025



**DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 23 Januari 2026

Direktur Ikan Air Laut



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Ikhsan Kamil, S.T., M.Sc.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Satker Direktorat Ikan Air Laut.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 23 Januari 2026

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Ida Widaningsih)
Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Asrianti Eka Rahmadi)
Perencana Pertama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Maksud dan Tujuan.....	11
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia.....	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya.....	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Budidaya.....	17
2.2. Sasaran Kegiatan.....	17
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	20
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja Ikan Air Laut.....	24
SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut.....	24
IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT..	24
IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT.....	27
IKSK 3. Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT.....	29
IKSK 4. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat.....	31
IKSK 5. Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat.....	33
IKSK 6. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT.....	36
IKSK 7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut Yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB).....	38
IKSK 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	42
IKSK 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji.....	45
IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut.....	46
IKSK 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji.....	48
IKSK 12. Sampel Monitoring Surveilans AMR Yang Diuji.....	51
IKSK 13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya.....	54

IKSK 14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	56
SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	59
IKSK 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	59
IKSK 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut	62
IKSK 17. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	67
IKSK 18. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	69
IKSK 19. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.	72
IKSK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	75
IKSK 21. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	77
BAB IV. PENUTUP.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025.....	12
Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang Pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	13
Gambar 3. Potensi Perikanan Budi Daya.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025.....	20
Gambar 5. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Tahun 2025	21
Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025	81

D A F T A R T A B E L

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat.....	22
Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT	24
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional pada tiap UPT	25
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT .	27
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT.....	29
Tabel 6. Realisasi Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT Tahun 2025	30
Tabel 7. Capaian Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat	31
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat.....	32
Tabel 9. Capaian Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat	34
Tabel 10. Rekapitulasi Penerima Bantuan Benih Kepiting yang Disalurkan Ke Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025	35
Tabel 11. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang Diproduksi untuk Operasional UPT	36
Tabel 12. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB).....	39
Tabel 13. Capaian Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut Yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)	40
Tabel 14. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	42
Tabel 15. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan IV Tahun 2025	43
Tabel 16. Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan IV Tahun 2025	44
Tabel 17. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji.....	45
Tabel 18. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut.....	47
Tabel 19. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	49
Tabel 20. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji di BPKIL Serang Triwulan IV Tahun 2025	50
Tabel 21. Capaian Sampel Monitoring Surveilans AMR yang Diuji	51

Tabel 22. Rincian Target dan Realisasi Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Triwulan IV Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB	52
Tabel 23. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	54
Tabel 24. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya TA 2025	55
Tabel 25. Capaian Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	57
Tabel 26. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	60
Tabel 27. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	61
Tabel 28. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut	66
Tabel 29. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	66
Tabel 30. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	68
Tabel 31. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2025	69
Tabel 32. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut	70
Tabel 33. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan IV Tahun 2025	71
Tabel 34. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	74
Tabel 35. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	76
Tabel 36. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025.....	76
Tabel 37. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	78
Tabel 38. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Penyelesaian Identifikasi Satker Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025.....	79
Tabel 39. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2021-2025	80

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2025, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025:

a) Terdapat 17 (tujuh belas) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya telah melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut, dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yaitu: (i) produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT (ekor), (ii) benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor), (iii) benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor), (iv) sampel survailan *anti microbial resistance* (amr) yang diuji (sampel), (v) sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel), (vi) sampel pakan ikan air laut yang diuji (sampel), (vii) sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (sampel), (viii) pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional upt (kg), (ix) sosialisasi/diseminasi/bimtek bidang perikanan budi daya (orang), (x) produksi benih ikan air laut dan kepiting UPT (ekor), (xi) produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT (ekor) dan (xii) unit budi daya ikan air laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB dan CPIB) (unit).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu: (i) presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker direktorat ikan air laut (persen), (ii) nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (nilai), (iii) indeks profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (indeks), (iv) persentase layanan perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (persen) dan (v) nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (persen).

b) Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut (rekomendasi kebijakan) dan (ii) klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan (unit).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (i) Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen) dan (ii) Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 80,95% Indikator Kinerja telah melampaui dan mencapai target triwulan yang ditetapkan dan 19,05% Indikator Kinerja yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “**BAIK**” dengan nilai **109,71**. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 10.462 ekor di BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPIUUK Karangasem;
2. **IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT sebanyak 100 ekor di BBPBAP Jepara;
3. **IKU 3. Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT (Ekor)**, telah diproduksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT sebanyak 389.715 ekor di BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo;
4. **IKU 4. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih ikan air laut sebanyak 1.434.850 ekor oleh beberapa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu: BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPIUUK Karangasem, BPBAP Takalar dan BPBL Batam;
5. **IKU 5. Benih Kepiting Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih kepiting sebanyak 175.000 ekor oleh BPBAP Takalar;
6. **IKU 6. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT (Kg)**, telah diproduksi pakan ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 6.780 Kg oleh BBPBL Lampung;
7. **IKU. 7 Unit Budi Daya Ikan Air Laut Yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB) (Unit)**, telah dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CBIB, CPIB) di 51 unit budi daya;
8. **IKU 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)**, telah dilakukan pelayanan pengujian parameter penyakit ikan air laut sebanyak 7.449 sampel di beberapa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
9. **IKU 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel pakan ikan air laut sebanyak 31 sampel di BBPBL Lampung;

10. **IKU 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)**, telah dibuat kebijakan tata Kelola bidang budi daya ikan air laut sebanyak 6 rekomendasi kebijakan oleh Direktorat Ikan Air Laut.
11. **IKU 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel parameter penyakit ikan air laut sebanyak 99 sampel di BPKIL Serang;
12. **IKU 12. Sampel Monitoring Surveilans AMR Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel monitoring Surveilans AMR sebanyak 90 sampel di beberapa laboratorium UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Lombok dan BPBL Batam;
13. **IKU 13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)**, telah dilaksanakan Sosialisasi bidang perikanan budi daya kepada 4.399 orang oleh Direktorat Ikan Air Laut;
14. **IKU 14. Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)**, telah dibuat kluster komoditas unggulan air laut berbasis Kawasan sebanyak 1 unit di BLUPPB Karawang.
15. **IKM 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, telah dilaksanakan penilaian PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan nilai sebesar 84,45;
16. **IKM 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)**, telah dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN dan Satker Direktorat Ikan Air Laut mendapatkan nilai indeks sebesar 81,24;
17. **IKM 17. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)**, telah diselesaikan temuan BPK lingkup Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan persentase penyelesaian sebesar 100%;
18. **IKM 18. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap temuan dan saran dari LHP Itjen oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut pada periode triwulan IV Tahun 2025 sehingga mendapatkan capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan sebesar 100%;
19. **IKM 19. Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)**, telah dilaksanakan penilaian layanan perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan nilai persentase sebesar 97,51%;
20. **IKM 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, telah mengikuti penilaian pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan nilai sebesar 84,27; dan
21. **IKM 21. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)**, telah dilakukan penilaian penyelesaian identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan nilai persentase sebesar 100%.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2025, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

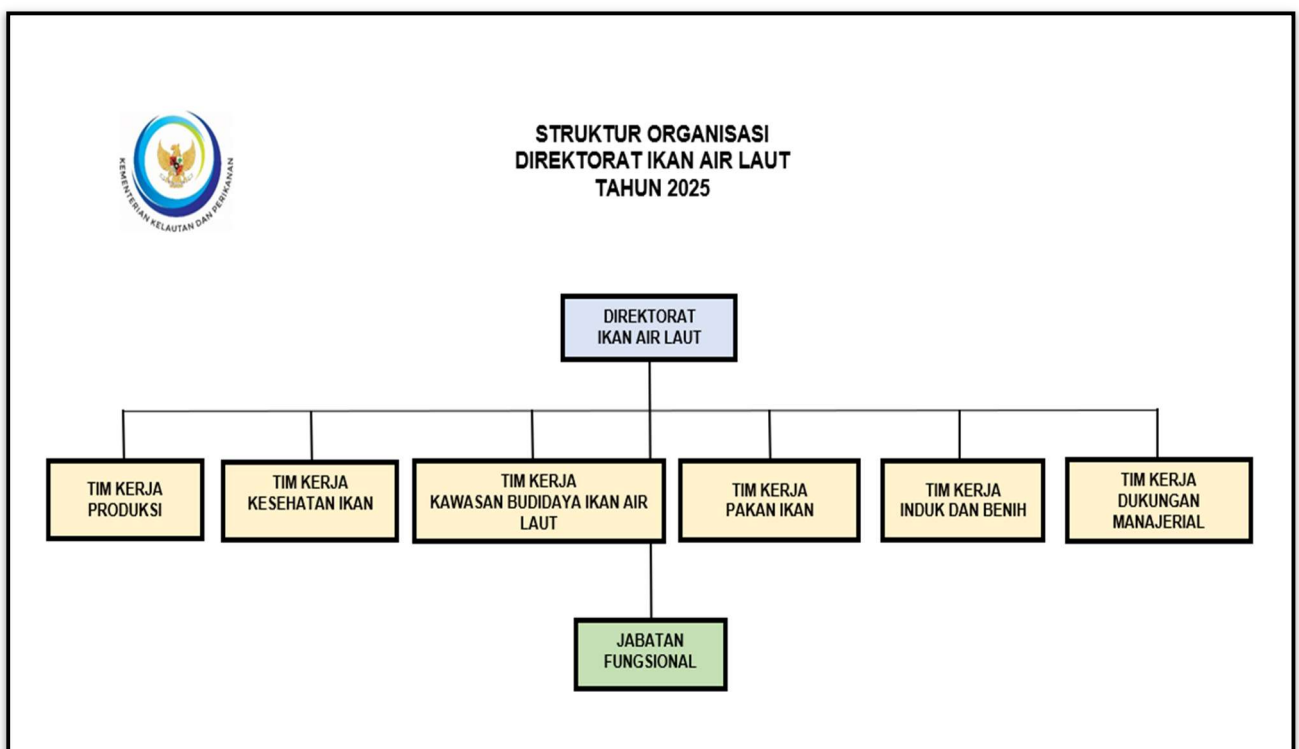
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

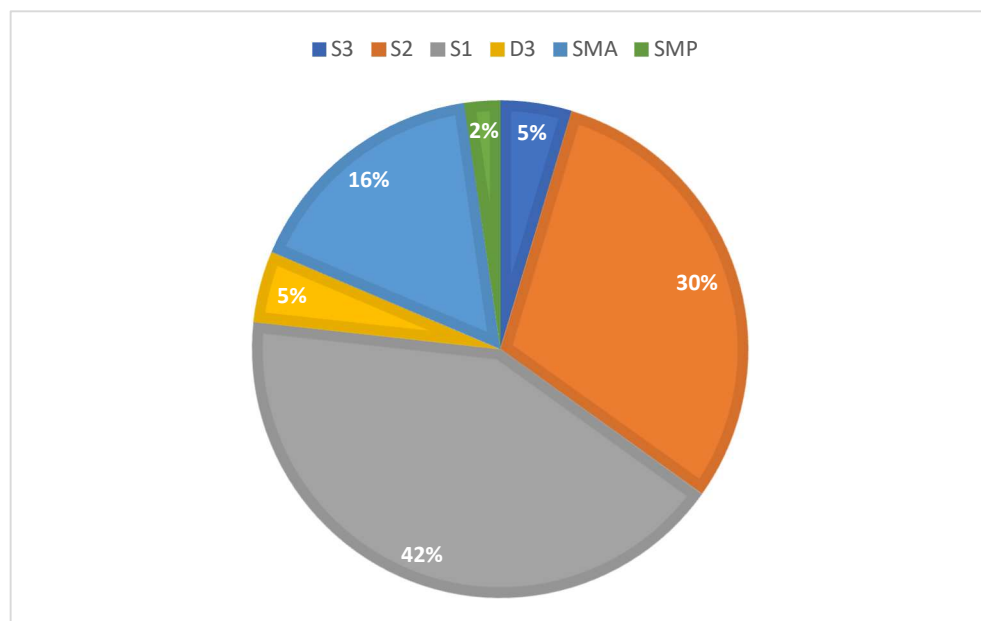
- 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 5%, S2 sebanyak 30%, S1 sebanyak 42%, D3 sebanyak 5%, SMA sebanyak 16% dan SMP sebanyak 2%.



Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

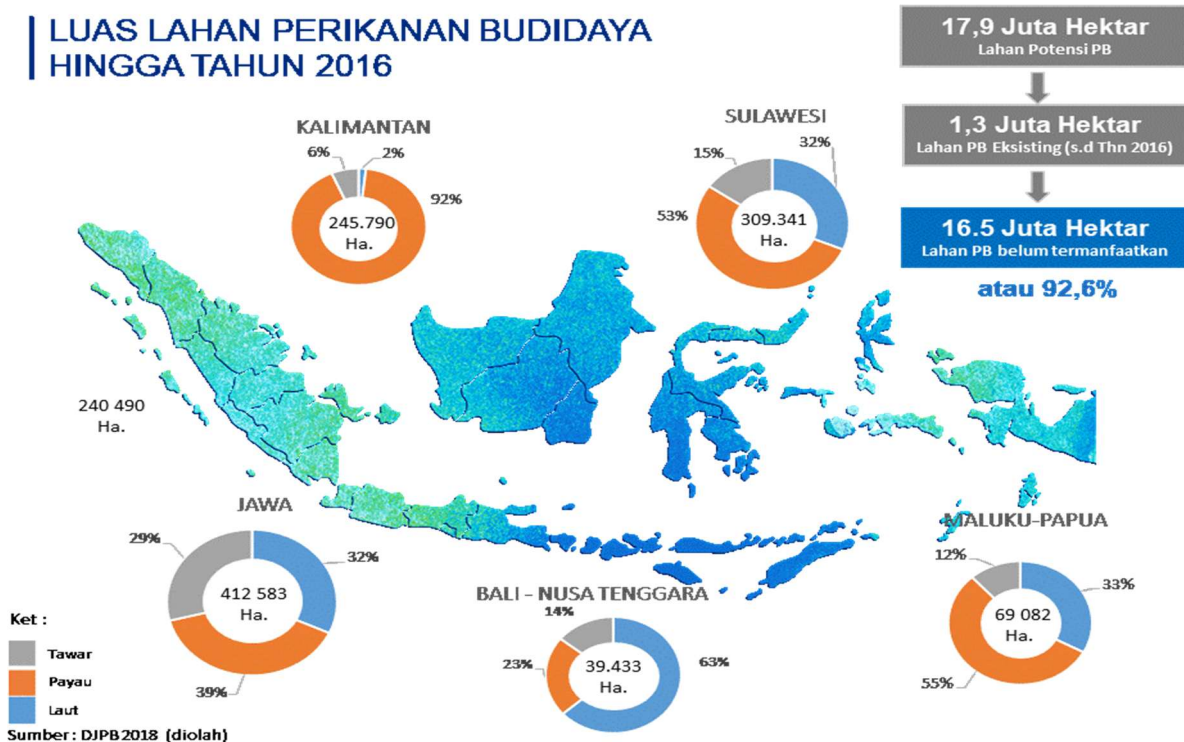
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 42 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil 31 orang,
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 7 orang dan
- PPPK Paruh Waktu 2 orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat

terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 3. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang pencapaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut 2025 selama kurun waktu Januari - Desember 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi anti mikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipati (PITAP). Klaster Kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP).

2.2. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025. Sasaran Kegiatan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 adalah Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Kamil
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (Ekor)	9.268
		2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (Ekor)	89
		3. Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT (Ekor)	360.601
		4. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	1.217.027
		5. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	174.574
		6. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	6.752
		7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB) (Unit)	9
		8. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.931
		9. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	12
		10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
		11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70
		12. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75
		13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	4.213
		14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan	15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81
		17. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100
		18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85
		19. Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
		20. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70
		21. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	4.824.909.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	242.784.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025		5.067.693.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



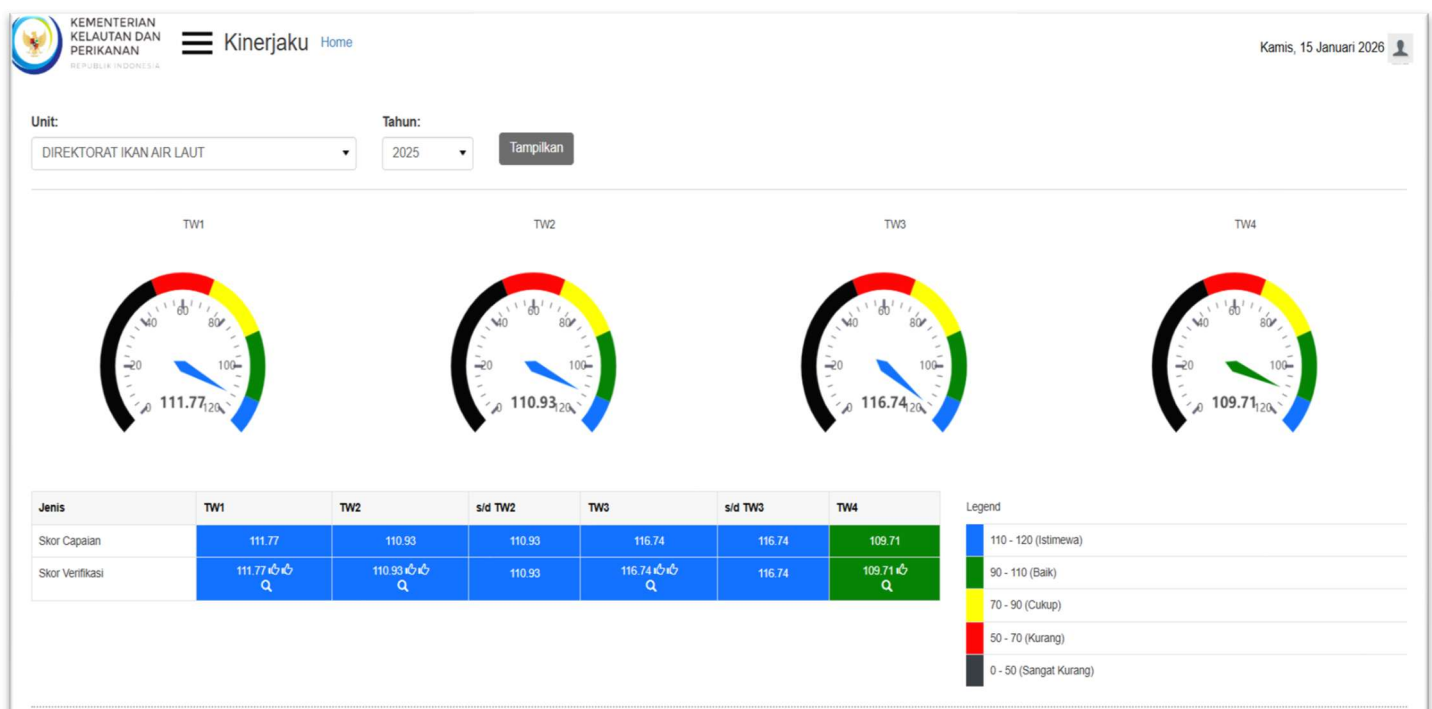
Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Revisi Kedua Direktorat Ikan Air Laut (Tanggal 1 Desember 2025)

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembudidayaan Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 10 (sepuluh) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 10 (sepuluh) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	9.268	Triwulan	9.268	10.462	112,88
		2) Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89	Tahunan	89	100	112,36
		3) Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT (ekor)	360.601	Tahunan	360.601	389.715	108,07
		4) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.217.027	Triwulan	1.217.027	1.434.850	117,89
		5) Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574	Triwulan	174.574	175.000	100,24
		6) Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	6.752	Triwulan	6.752	6.780	100,41
		7) Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) (Unit)	9	Tahunan	9	51	566,66
		8) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.931	Triwulan	282	7.449	385,75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW IV	Realisasi TW IV	%	
		9)	Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	12	Triwulan	12	31	258,33
		10)	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6	Tahunan	6	6	100,00
		11)	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70	Triwulan	20	99	141,43
		12)	Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75	Triwulan	75	90	120,00
		13)	Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	4.213	Tahunan	4.213	4.399	104,41
		14)	Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1	Tahunan	1	1	100,00
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	15)	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84	Tahunan	84	84,45	100,54
		16)	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81	Semesteran	81	81,24	100,29
		17)	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100	Tahunan	100	100	100,00
		18)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85	Triwulan	85	100	117,65
		19)	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80	Tahunan	80	97,51	121,88
		20)	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70	Tahunan	70	84,27	120,39
		21)	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100	Tahunan	100	100	100,00

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan budi daya yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 13 Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada indikator tersebut dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem. Produksi calon induk unggul ikan air laut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT lingkup DJPB.

Target indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 9.628 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	9.268	10.462	112,88	-	-

• Capaian Kinerja

Pada tabel diatas realisasi pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 10.462 ekor dari target Tahunan yakni 9.268 ekor. Pada penghitungan realisasi capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 112,88% dan mencapai 112,88% pada target

tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target produksi calon induk unggul untuk operasional UPT telah terpenuhi dan melampaui target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi dan capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional masing-masing UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi dan capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional pada tiap UPT

No	Nama UPT	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	902	915	101,4
2	BPBAP Situbondo	4.453	4.473	100,4
3	BPBAP Ujung Batte	Anggaran diblokir		
4	BPBL Ambon	1.134	1.278	112,7
5	BPBL Batam	1.820	2.206	121,2
6	BPBL Lombok	948	1.155	121,8
7	BPIUUK Karangasem	11	435	3.954,5
Total		9.268	10.462	112,88

Berdasarkan tabel tersebut, capaian produksi calon induk unggul ikan air laut tertinggi dicapai oleh BPIUUK Karangasem dengan persentase capaian sebesar 3.945,5%, diikuti oleh BPBL Lombok 121,8%, BPBL Batam 121,2%, BPBL Ambon 112,7%, BBPBL Lampung 101,4% dan BPBAP Situbondo 100,4%, sedangkan untuk BPBAP Ujung Batee tidak terdapat realisasi produksi karena Anggaran diblokir.

Kontribusi realisasi produksi calon induk unggul tersebut berasal dari UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, dengan capaian yang bervariasi antar UPT. Semua UPT yang terdapat realisasi calon induk unggul menunjukkan realisasi di atas 100% dari target, meskipun BPBAP Ujung Batee tidak ada realisasi karena anggaran diblokir namun keseluruhan capaian sudah melampaui target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 112,88%, yang mengindikasikan optimalisasi kapasitas produksi dan efektivitas pengelolaan induk pada masing-masing unit. Secara keseluruhan, capaian ini mendukung ketersediaan calon induk unggul secara berkelanjutan untuk operasional UPT serta menjadi faktor pendukung dalam pengembangan budidaya ikan air laut secara nasional.

Perbedaan capaian antar UPT disebabkan oleh variasi dalam tata kelola budi daya, jenis komoditas yang dikembangkan, serta teknis penanganan calon induk di masing-masing satuan kerja. Setiap komoditas ikan air laut memiliki karakteristik yang

berbeda terhadap pertumbuhan, kebutuhan pakan dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan perairan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan produksi calon induk unggul ikan air laut antara lain adalah adanya perbedaan karakteristik komoditas antar UPT yang memengaruhi jumlah calon induk yang dihasilkan, keterbatasan sarana dan prasarana produksi serta perbedaan jadwal siklus budi daya antar unit kerja. Selain itu, beberapa UPT memiliki jadwal produksi tahunan sehingga capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Untuk menunjang keberlanjutan dan peningkatan produksi calon induk ikan air laut yang unggul, disarankan agar setiap UPT melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) budidaya induk secara konsisten. Penerapan SOP yang baik akan membantu proses monitoring performa pertumbuhan dan kesehatan calon induk, sekaligus menjamin mutu hasil produksi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan kualitas calon induk unggul ikan air laut, antara lain perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan biosecurity secara optimal di seluruh fasilitas budi daya.
- 2) Pengelolaan pakan secara tepat (ukuran, jumlah, dan frekuensi) dengan memperhatikan kandungan nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis komoditas yang dikembangkan.
- 3) Peningkatan penerapan prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) di seluruh kegiatan budi daya yang dilaksanakan di UPT.
- 4) Peningkatan kapasitas produksi benih unggul melalui seleksi yang ketat terhadap calon induk sesuai dengan peraturan/standar operasional yang berlaku.
- 5) Penguatan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang efisiensi dan kualitas hasil.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 161.536.000 (99,81%) dari pagu Rp 161.830.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 63.170.000 (99,88%) dari pagu Rp 63.244.000
- BPBAP Ujung Batee: Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 0 (Anggaran diblokir)
- BPBL Ambon: Rp. 305.968.000 (100%) dari pagu Rp 305.968.000
- BPBL Batam: Rp. 384.565.566 (99,88%) dari pagu Rp 385.000.000
- BPBL Lombok: Rp. 255.201.249 (99,70%) dari pagu Rp 255.960.000
- BPIUUK Karangasem: Rp. 3.000.000 (100%) dari pagu Rp 3.000.000

Total anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar Rp.1.175.002.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.173.440.815,- atau mencapai 99.87% anggaran terserap.

IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Indikator produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT merupakan salah satu kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang bertanggungjawab pada pelaksanaan indikator tersebut adalah BBPBAP Jepara. Produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul keping yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT tersebut.

Target indikator produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT lingkup DJPB pada triwulan IV sama dengan tahun 2025 yaitu 89 ekor karena capaian ini diukur pada akhir tahun. Capaian indikator produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

- Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	89	100	112,36	-	-

Pada data diatas capaian indikator kinerja produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT mencapai 100 ekor dari target 89 ekor dengan persentase 112,36%. Secara capaian indikator calon induk unggul keping untuk operasional UPT sudah mencapai target yang ditetapkan.

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator produksi calon induk unggul keping untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu

juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Calon induk unggul kepiting sebanyak didapat dari pendederan crablet dengan ukuran lebar karapas 0,5 cm dan berat 0,01 gram, pemeliharaan dilakukan selama 110 hari hingga mencapai ukuran dengan lebar rata-rata karapas 8,5 cm dengan berat rata-rata 87,5 gram. Target 89 ekor calon induk kepiting merupakan target triwulan IV dan juga target tahunan dan terealisasi 100 ekor calon induk kepiting atau 112,36% dari target tahunan yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT antara lain: a) Kelangsungan hidup calon induk kepiting rendah berkisar 5-10%; b) Ketersediaan pakan alami di tambak terbatas sehingga penggunaan pakan ikan rucah yang berlebih menyebabkan penurunan kualitas air dan mortalitas; dan c) Kanibalisme kepiting yang cukup tinggi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi pada kegiatan produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT antara lain: a) Menumbuhkan pakan alami di tambak untuk menambah ketersediaan pakan alami sehingga menurunkan kanibalisme kepiting; b) Melakukan penjarangan/sistem modular pada ukuran tertentu (30 g) untuk padat tebar kepiting sehingga mengurangi kanibalisme antar kepiting; dan c) Melakukan uji coba pakan fungsional (pakan buatan) sebagai alternatif pengganti ikan rucah.

Tindak lanjut yang dilakukan pada Timja Induk dan Benih yaitu mengumpulkan data terkait kegiatan calon induk unggul kepiting pada BBPBAP Jepara. Rencana tindak lanjut di tambak dalam rangka meminimalisir kanibalisme adalah dengan selalu memenuhi kebutuhan pakan alaminya berupa kerang coklat dan udang-udangan (jambret). Selain itu juga melakukan pengamatan pertumbuhan kepiting dan menjaga kondisi kualitas air tetap baik. Pertumbuhan calon induk kepiting, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran awal, pakan, dan kondisi lingkungan pemeliharaan. Pemberian pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kepiting akan mempengaruhi pertumbuhan optimal pada budi daya kepiting. Kondisi lingkungan pemeliharaan seperti kualitas air, suhu, dan salinitas juga berpengaruh pada pertumbuhan kepiting. Kepiting yang dipelihara dalam kondisi yang optimal akan tumbuh lebih cepat.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT di BBPBAP Jepara mencapai Rp 2.365.000 (71,03%) dari pagu Rp 3.330.000.

IKSK 3. Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT

Indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT merupakan salah satu kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang bertanggungjawab pada pelaksanaan indikator tersebut adalah BBPBAP Jepara untuk produksi benih kepiting dan BPBAP Situbondo untuk produksi benih ikan air laut. Target indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT pada triwulan IV sama dengan tahun 2025 yaitu 360.601 ekor karena capaian ini diukur pada akhir tahun.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	360.601	389.715	108,07	-	-

Pada data diatas capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT mencapai 389.715 ekor dari target 360.601 ekor dengan persentase 108,07% terhadap target triwulan iv dan tahunan. Secara capaian indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT sudah mencapai target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Secara capaian indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT sudah mencapai target yang ditetapkan, sehingga dalam proses pelaksanaan indikator berjalan dengan baik. Capain yang melebihi target yang ditetapkan oleh BPBAP Situbondo berkaitan dengan SR (survival rate), HR (hatching rate), fekunditas ikan yang baik.

Tabel 6. Realisasi Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT Tahun 2025

No	Nama UPT	Target Tahun 2025	Capaian		Keterangan
			Volume TW IV	Persentase Tahunan (%)	
1	BBPBAP Jepara	189,790	170,951	90,07%	Benih kepiting
2	BPBAP Situbondo	170,811	218,764	128,07%	Benih Ikan air laut
Total		360,601	389,715	108, 07%	

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja ini merupakan gabungan dari 2 target komoditas dari 2 UPT yang berbeda dengan benih kepiting dihasilkan oleh BBPBAP Jepara dengan realisasi sebesar 170.951 ekor atau sebesar 90,07% dari target sebesar 189.790 ekor dan benih ikan air laut yang dihasilkan oleh BPBAP Situbondo dengan realisasi sebesar 218.764 ekor atau sebesar 128,07 dari target sebesar 170.811 ekor. Realisasi dari produksi 2 benih komoditas tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT antara lain: a) Ketersediaan pakan alami (rotifer dan chlorella) belum berkesinambungan, hal tersebut karena cuaca yang berfluktuasi; b) Survival Rate (SR) mencapai 3 - 10%; c) Terjadi kanibalisme pada benih kepiting yang dimulai pada stadia megalopa; dan d) Pemasaran benih kepiting masih minim dan terbatas untuk pembudidaya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi pada kegiatan produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT antara lain: a) Menambah ketersediaan pakan alami untuk benih kepiting; b) Menambah jumlah dan meningkatkan nutrisi pakan alami; c) Penggunaan berbagai jenis shelter untuk mengurangi kanibalisme pada benih kepiting; dan d) Melakukan promosi, sosialisasi, dan membuka peluang kerjasama dengan pihak lain.

Rencana tindak lanjut di tambak dalam rangka meminimalisir kenibalisme adalah dengan selalu memenuhi kebutuhan pakan alaminya berupa kerang coklat dan udang-udangan (jambret). Selain itu juga melakukan pengamatan pertumbuhan ikan dan kepiting dan menjaga kondisi kualitas air tetap baik. Pemberian pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan ikan dan kepiting akan mempengaruhi pertumbuhan optimal. Kondisi lingkungan pemeliharaan seperti kualitas air, suhu, dan salinitas juga berpengaruh pada pertumbuhan ikan dan kepiting.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi benihd ikan air laut dan kepiting di UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBAP Jepara: Rp. 62.514.900 (90,99%) dari pagu Rp 68.703.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 10.216.856.817 (99,80%) dari pagu Rp 10.237.816.000

Total anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT mencapai Rp 10.279.371.717 (99.74%) dari pagu Rp 10.306.519.000.

IKSK 4. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator jumlah benih ikan air laut yang direncanakan untuk disalurkan ke masyarakat, yang berhasil disalurkan secara aktual. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penyaluran benih ikan air laut dalam mendukung pembudidayaan ikan oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem.

Target indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 1.217.027 ekor. Kriteria pelaksanaan kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat tertuang dalam Kepdirjend Perikanan Budi Daya no 311 beserta perubahannya tentang petunjuk teknis bantuan benih ikan lingkup UPT DJPB tahun 2025. Target indikator bantuan benih ikan air laut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

• Capaian Kinerja

Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	1.217.027	1.434.850	117,89	-	-

Pada tabel diatas realisasi pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah terlaksana dengan baik dimana realisasi mencapai 1,434,850 ekor dari target tahun 2025 dengan jumlah 1,217.027 ekor. Pada penghitungan realisasi TW IV capaian pada indikator benih ikan air laut yang

disalurkan ke masyarakat mencapai 117,89% dari target tahunan dan sama jika dibandingkan dengan target triwulan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Kriteria pelaksanaan kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat tertuang dalam Kepdirjend Perikanan Budi Daya no 311 beserta perubahannya tentang petunjuk teknis bantuan benih ikan lingkup UPT DJPB tahun 2025. Target indikator bantuan benih ikan air laut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 8. Realisasi dan capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Nama UPT	Target 2025	Capaian Volume TW IV	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	402.368	404.900	100,63
2	BPBAP Takalar	19.073	19.400	101,71
3	BPBAP Ujung Bate	29.121	200.650	689,02
4	BPBL Ambon	212.256	214.000	100,82
5	BPBL Batam	250.211	279.000	111,50
6	BPBL Lombok	165.386	213.900	129,33
7	BPIUUK Karangasem	61.945	103.000	166,28
Total		1.217.027	1.434.850	117,90

Pada data diatas capaian indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 1,434,850 ekor dari target 1,217,027 ekor dengan persentase 117,90%. Persentase capaian tertinggi yaitu BPBAP Ujung Bate dengan volume 200,650 ekor atau 689,02% dan capaian terendah yaitu BPBL Lampung dengan volume 214,000 ekor atau 100,63%.

Penerima bantuan benih ikan air laut pada masing-masing UPT yaitu BBPBL Lampung berjumlah 10 kelompok, BPBAP Takalar berjumlah 3 kelompok, BPBAP Ujung Bate berjumlah 10 kelompok, BPBL Ambon berjumlah 13 kelompok, BPBL

Batam berjumlah 35 kelompok, BPBL Lombok berjumlah 12 kelompok, dan BPIUUK Karangasem berjumlah 3 kelompok.

Secara capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah melebihi target yang ditetapkan, sehingga dalam proses pelaksanaan indikator berjalan dengan baik. Pada triwulan IV tidak ada permasalahan yang di hadapi. Selain itu juga kualitas benih yang baik mempengaruhi produksi benih yang digunakan untuk bantuan benih ikan air laut. Keberhasilan produksi benih untuk bantuan benih ikan air laut ke masyarakat berkaitan dengan SR (*survival rate*), HR (*hatching rate*), dan fekunditas yang baik.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi pada kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat yakni berfokus pada perbaikan/pemulihan kualitas induk ikan dan produksi pakan alami untuk mensupport kegiatan yang lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi antar tim kerja guna memastikan hasil produksi yang lebih optimal.

Tindak lanjut yang dilakukan pada Timja Induk dan Benih yaitu mengumpulkan data terkait kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing UPT. Tindak lanjut di tempat budi daya yakni tetap melakukan produksi benih sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menyalurkan bantuan benih berdasarkan usulan masyarakat sesuai petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 1.565.502.499 (99,99%) dari pagu Rp 1.565.554.000
- BPAP Takalar: Rp. 114.409.345 (99,97%) dari pagu Rp 114.438.000
- BPBAP Ujung Batee: Rp. 174.713.900 (99,99%) dari pagu Rp. 174.722.000
- BPBL Ambon: Rp. 1.273.439.804 (99,99%) dari pagu Rp 1.273.534.000
- BPBL Batam: Rp. 1.149.181.000 (99,93%) dari pagu Rp 1.148.350.465
- BPBL Lombok: Rp. 991.167.702 (99,88%) dari pagu Rp 992.315.000
- BPIUUK Karangasem: Rp. 371.043.869 (99,83%) dari pagu Rp 371.675.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar Rp.5.638.627.584,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.641.419.000,- atau mencapai 99,95% anggaran terserap.

IKSK 5. Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat adalah bantuan pemerintah dengan perhitungan jumlah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sesuai dengan kelompok penerima yang sudah ditetapkan. Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki nilai

ekonomis tinggi. Indikator benih kepiting yang disalurkan kepada masyarakat digunakan dalam efektifitas dan efisiensi penyaluran benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dalam mendukung pembudidayaan kepiting oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh BPBAP Takalar sebagai penanggungjawab pelaksana bantuan.

Target indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 174.574 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target BPBAP Takalar.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 9. Capaian Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	1.74.574	175.000	100,24	-	-

Pada tabel diatas realisasi pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik yakni mencapai 175.000 ekor dari target TW IV 174.574 ekor. Pada penghitungan persentase realisasi TW IV, capaian pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 100,24% sama dengan capaian pada target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi atas kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan IV sudah dilaksanakan dengan baik, dimana persentase capaian mencapai 100,24% pada target tahunan. Secara capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 10. Rekapitulasi Penerima Bantuan Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat triwulan IV Tahun 2025

No	Ukuran	Jumlah (ekor)	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
1	2 - 3 cm	50,000	Perairan Mappakalombo	Syarifuddin, SH	Mappakalombo	Galesong	Takalar	Sulawesi Selatan
2	2 - 3 cm	75,000	Nikarannuang	Herman Dg. Tiro	Mappakalombo	Galesong	Takalar	Sulawesi Selatan
3	2 - 3 cm	50,000	Tirta	Aman Suyuti	Bolurokeng	Biringkanaya	Makasar	Sulawesi Selatan
TOTAL		175,000						

Data penerima bantuan benih kepiting pada BPBAP Takalar yaitu 3 kelompok penerima antara lain Perairan Mappakalombo, Nikarannuang, dan Pokdakan Tirta dengan ukuran benih 2-3 cm.

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat yaitu: a) Ketersediaan induk kepiting terbatas, serta ukuran induk kepiting yang beragam (ada yang tidak sesuai dengan SNI induk); b) Pompa air laut penyuplai ke bak tandon sempat mengalami kerusakan; c) Pakan alami (*Chlorella* sp.) mengalami pertumbuhan sel yang melambat akibat sering hujan; dan d) Pakan alami (Rotifer) kepadatannya rendah akibat kekurangan *Chlorella* sp.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi pada kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat yaitu: a) Melakukan pemeliharaan lanjutan induk kepiting sampai penetasan ke dua untuk menyesuaikan dengan SNI induk; b) Perbaiki pompa air laut atau membeli yang baru; c) Guna mengatasi kekurangan pakan alami (rotifer) dengan pemberian ragi laut dan pemberian pakan buatan lebih awal pada larva kepiting; dan d) Untuk efisiensi kultur pakan alami disarankan agar lokasi kultur pakan alami berdekatan dengan unit pembenihan kepiting.

Tindak lanjut pada kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat yaitu: a) Untuk mengantisipasi sulitnya induk alam yang sesuai dengan SNI maka tim produksi benih kepiting mencoba memelihara rajungan untuk calon induk di Soliter Sibiru dan bak tandon; dan b) Fluktuasi suhu diantisipasi dengan menutup bak larva pemeliharaan pada malam hari dengan plastik HDPE.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Capaian anggaran pada TW IV pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat di BPBAP Takalar sebesar Rp 133.261.700 (99,02%) dari pagu anggaran Rp 134.574.000.

IKSK 6. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan berkembang biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: 1) pakan ikan terapung; 2) pakan ikan melayang; dan 3) pakan ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: (1) cair; (2) pasta; (3) tepung; (4) kapsul; (5) remah; dan (6) pellet.

Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria:

- disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;
- penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan
- formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi.

Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan salah satu program dari DJPB untuk memproduksi secara mandiri pakan ikan yang akan dimanfaatkan oleh UPT itu tersebut. Satker yang melaksanakan indikator tersebut yaitu BBPBL Lampung. Target tahun 2025 pada indikator ini yaitu 6.752 kg. Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh satker untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya ikan air laut. Indikator diukur guna mengoptimalkan unit produksi pakan ikan air laut, memaksimalkan penggunaan bahan baku pakan ikan yang tersedia dan menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi.

• Capaian Kinerja

Capaian indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	6.752	6.780	100,41	-	-

Pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT dalam hal ini BBPBL Lampung telah mencapai 6.780 kg dengan presentase capaian terhadap TW IV 100,41% dan sama dengan capaian tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Capaian pakan ikan air laut yang diproduksi BBPBL Lampung sudah melebihi target pada triwulan ini dan target tahunan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang dihadapi antara lain:

- a. BBPBL Lampung selama ini melakukan kegiatan produksi pakan ikan jenis apung dan tenggelam. Pakan yang dihasilkan mengandung kadar protein berkisar 30 - 32% yang dapat digunakan sebagai pakan untuk budi daya ikan air tawar seperti lele. Hal ini tentunya belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan dikarenakan untuk dapat memproduksi pakan ikan laut dengan kadar protein minimal 40% diperlukan standar biaya keluaran (SBK) yang lebih tinggi dari produksi pakan ikan saat ini. Sebagai informasi tambahan bahwa produksi pakan yang dihasilkan oleh BBPBL Lampung di tahun 2024 sebesar kurang lebih 63.000 kg dan hingga saat ini harga jualnya ditetapkan sebesar Rp. 7.500/kg untuk pakan tenggelam dan Rp. 7.800/kg untuk pakan terapung sesuai ketentuan PP Nomor 85 tahun 2021; dan
- b. Mesin pakan yang digunakan merk Shengrun buatan China dengan kapasitas 600-700 kg/jam dan mesin masih dalam kondisi baik dan dapat beroperasi. Namun karena target produksi yang cukup rendah, maka pada setiap kali produksi (per batch) biaya operasionalnya cukup besar sehingga dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dari kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Perlunya dibangun koordinasi dan kesepakatan terkait dengan penentuan target produksi pakan dalam IKU antara UPT dan direktorat teknis matra;
- b. Perlunya penyesuaian komponen SBK untuk kebutuhan operasional produksi pakan ikan laut;
- c. Perlunya penyesuaian harga pakan yang dijual, karena saat ini terlalu rendah jika mengikuti ketentuan PP 85 tahun 2021 tentang tarif PNPB bidang kelautan perikanan yang menyebabkan kemungkinan target produksi tidak tercapai karena

mahalnya harga bahan baku pakan;

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu proses menyusun rencana pengadaan bahan baku dan persiapan mesin pakan untuk produksi pakan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap di TW IV pada produksi pakan untuk operasional UPT di BBPBL Lampung mencapai Rp. 88.179.550 atau 99.99% dari pagu Rp 88.187.000.

IKSK 7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari:

- 1) Pembinaan CBIB adalah pembinaan cara budidaya ikan yang baik untuk unit budi daya ikan air laut agar hasil produksi perikanan budidayanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke sistem OSS. Pada saat ini, penerapan CBIB bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Pembinaan CPIB adalah pembinaan cara pembenihan ikan yang baik yang dilakukan terhadap seluruh unit budi daya ikan air laut yang memproduksi benih ikan sehingga induk dan benih yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Pembinaan CBIB dan CPIB pada unit budidaya ikan air laut dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sedangkan sertifikasi CBIB dan CPIB dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Direktorat Ikan Air Laut dalam mendukung peningkatan mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan usaha perikanan budi daya. Tim pelaksana kegiatan adalah Tim Kerja Produksi, Direktorat Ikan Air Laut. Indikator kinerja unit budidaya ikan laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CPIB dan CBIB) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi penerapan standar sertifikasi pada unit budidaya ikan laut, sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan kinerja tata kelola unit usaha.

Target tahunan Indikator kinerja Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) adalah sebanyak 9 (Unit) dengan rincian 1 unit untuk CBIB dan 8 unit untuk CPIB.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator unit budi daya ikan air laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB dan CPIB) realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	9	51	566,67	-	-

Pada tabel diatas realisasi pada indikator unit budi daya ikan air laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB dan CPIB) sudah dilaksanakan dengan baik yakni mencapai 51 unit ekor dari target 9 unit atau sebesar 566,67% dari target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) tahun 2025 dilaksanakan dengan metode sosialisasi pada pembudidaya komoditas ikan laut dan lobster. Target dan realisasi kegiatan Unit Budidaya Ikan Laut yang diibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Capaian Indikator Unit Budidaya Ikan Air Laut yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

No	Unit Kerja	Target Tahunan (Unit)	Realisasi TW 4 (Unit)	Persentase (%)
1	Pembinaan CBIB	1	33	3.300
2	Pembinaan CPIB	8	18	225
Total		9	51	566,67

Berdasarkan data tersebut, Capaian indikator Unit Budidaya Ikan Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) menunjukkan kinerja yang melampaui target tahunan. Realisasi pembinaan CBIB pada Triwulan IV mencapai 33 unit atau 3.300% dari target tahunan sebesar, sedangkan pembinaan CPIB terealisasi sebanyak 18 unit atau 225% dari target tahunan dan totalnya sebesar 51 unit atau sebesar 566,67% dari target tahunan.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi penerapan standar CBIB dan CPIB pada unit budidaya ikan laut. Tingginya realisasi dibandingkan target menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan antusiasme pelaku usaha terhadap penerapan sertifikasi, sekaligus mengindikasikan bahwa metode sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan mampu menjangkau unit usaha lebih luas dari yang direncanakan. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap penguatan tata kelola usaha budidaya ikan laut serta peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kegiatan pembinaan CPIB dan CBIB dilakukan sesuai dengan amanat dari Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 463 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Berdasarkan Keputusan Dirjen tersebut, terdapat tahapan dan mekanisme yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan CPIB: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Fasilitasi dan Pemeriksaan Lapangan;
- 2) Pembinaan CBIB: Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Fasilitasi.

Selama tahun 2025, Direktorat Ikan Air Laut melakukan pembinaan CPIB dan CBIB dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi Daya yang terdekat dari kawasan yang memiliki potensi budi daya air laut. Sosialisasi dilakukan secara *luring* dengan melibatkan unit pembenihan dan pembesaran yang berlokasi di sekitar UPT Ditjen Perikanan Budi Daya.

Dari sisi manajemen kegiatan, pembinaan CPIB dan CBIB untuk komoditas ikan air laut dan lobster dipandang kurang efektif jika dilakukan secara daring. Untuk

itu, sampai dengan triwulan ke IV tahun 2025, kegiatan pembinaan dilakukan secara *luring* dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Sementara permasalahan dari sisi teknis yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha mengalami kendala dalam pemenuhan dokumen perizinan berusaha (PKKPRL) dan membutuhkan pendampingan dari Ditjen Perikanan Budi Daya dan Dinas setempat.
- b) Unit pembenihan skala kecil mengalami kesulitan dalam memenuhi standar IPAL sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 1 Tahun 2025.
- c) Sulitnya memperoleh telur ikan kerapu menyebabkan gangguan kontinuitas produksi.
- d) Harga pakan dan bahan input lainnya menjadi beban biaya utama.
- e) Serangan penyakit pada fase pembesaran menurunkan survival rate (SR) dan nilai jual produk.
- f) Pelaku usaha membutuhkan pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) untuk mendukung sertifikasi CPIB.

• **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Menyikapi kendala yang terjadi di sisi manajerial, maka rekomendasi yang diberikan adalah perlu dilakukan penyesuaian anggaran agar pembinaan CPIB dan CBIB dapat menyentuh semua lokasi yang memiliki potensi budi daya ikan air laut. Sementara dari sisi teknis, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan:

- a) Direktorat Ikan Air Laut dipandang perlu melakukan fasilitasi untuk pendampingan penyusunan dokumen perizinan berusaha: PKKPRL bagi pelaku usaha. Hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan Ditjen terkait.
- b) Mendorong penyusunan pedoman teknis IPAL sederhana yang dapat diterapkan oleh HSRT dengan lahan terbatas.
- c) Mengusulkan kegiatan pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) untuk unit pembenihan ikan laut.
- d) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Teknis lain dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses bahan baku (benih dan calon induk).
- e) Melanjutkan pembinaan rutin dan monitoring lapangan terhadap unit yang telah menerapkan CPIB dan CBIB.

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program dan Kerjasama terkait dengan penyesuaian target dan anggaran kegiatan tahun 2026;

- b) Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelatihan MPM pada tahun anggaran berikutnya berkoordinasi dengan Direktorat pengampu (Focal Point).
- c) Pemetaan unit usaha yang siap untuk sertifikasi CPIB/CBIB dan pendampingan administratif dengan menyampaikan surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki potensi budi daya ikan air laut.
- d) Koordinasi lintas instansi (KKP, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten) untuk penanganan isu perizinan dan IPAL.
- e) Dokumentasi kegiatan dan penyusunan laporan hasil pembinaan sebagai dasar perencanaan rencana aksi lanjutan tahun 2026.

• Realisasi Penggunaan Anggaran

Capaian anggaran pada TW IV pada Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) sebesar Rp 45.977.820 (99,69%) dari pagu anggaran Rp 46.122.000.

IKSK 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh 4 UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok. Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 1.931 sampel dan pada triwulan IV sebanyak 282 sampel.

• Capaian Kinerja

Capaian indikator sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Capaian Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
68,466	60.846	-	-	1.931	7.449	385,76	-	-89,12

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, capaian sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium sebesar 7.449 sampel atau mencapai 385,76% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium merupakan indikator baru muncul kembali pada Timja Kesehatan Ikan pada tahun 2025, pada tahun 2021 hingga 2022 Indikator Kinerja ini masih dilakukan pengukuran saat belum ada perubahan SOTK yaitu masih di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan lalu pada tahun 2023 hingga 2024 indikator ini tidak lagi dilakukan pengukuran dan pada tahun 2025 ini pengukurannya Kembali dilakukan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2023 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025, namun untuk kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 didapatkan nilai sebesar -89,12%.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memiliki target tahunan sebesar 1.931 (Sampel) dan realisasi triwulan IV sebesar 7.449 sampel yang berasal dari layanan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan di 4 UPT DJPB yang mencakup sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan IV Tahun 2025

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Realisasi TW IV	Capaian (%)
1	BPBL Batam	744	1.376	184,95
2	BBPBL Lampung	517	1.647	318,57
3	BPBL Lombok	374	3.832	1.024,6
4	BPBL Ambon	296	622	210,13
Total		1,931	7.449	385,76

Berdasarkan Tabel di atas, secara keseluruhan capaian layanan pengujian sampel laboratorium kesehatan ikan air Laut sampai dengan triwulan IV sangat baik yakni mencapai 385,76%. Capaian pengujian sampel tertinggi adalah laboratoirum BPBL Lombok mencapai 1.024,6%, diikuti BBPBL Lampung 318,57%, dan BPBL Ambon 210,13% dan BPBL Batam sebesar 184,95%.

Tabel 16. Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan IV Tahun 2025.

No	UPT DJPB	Ruang Lingkup					Total
		Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu	
1	BBPBL Lampung	1.046	252	208	83	58	1.647
2	BPBL Batam	669	440	90	149	-	1.348
3	BPBL Lombok	3.330	77	60	365	-	3.832
4	BPBL Ambon	284	317	-	21	-	622
Total		5.329	1.086	358	618	58	7.449

Berdasarkan tabel diatas sampai triwulan IV untuk kualitas air sebesar 5.329 sampel, mikrobiologi 1.086 sampel, biologi molekuler 618 sampel, patologi 358 sampel, dan residu 58 sampel. Capaian realisasi didominasi oleh besarnya jumlah pengujian kualitas air dan patologi di setiap UPT yang relatif tidak membutuhkan biaya pengujian yang besar karena hanya menggunakan alat. Rendahnya capaian sampel residu disebabkan oleh tidak terdapatnya kegiatan monitoring residu di bidang air laut.

Realisasi sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan telah melebihi target, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu terbatasnya anggaran untuk maintenance dan kalibrasi peralatan laboratorium, dan adanya efisiensi anggaran untuk pengujian sehingga UPT mengandalkan monitoring pasif dan banyak sampel yang diambil di lingkungan balai.

• Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target adalah agar UPT memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan pengujian sampel penyakit ikan air laut dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan dapat berjalan optimal dan dapat melakukan monitoring secara aktif.

• Realisasi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 201.658.288 (95,65%) dari pagu Rp. 210.824.000,-
- BPBL Batam sebesar Rp. 171.451.412 (99,95%) dari pagu Rp. 171.542.000,-
- BPBL Ambon sebesar Rp. 69.400.000 (70,56%) dari pagu Rp. 98.350.000,-
- BPBL Lombok sebesar Rp. 144.561.251 (99,99%) dari pagu Rp. 144.570.000,-

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan adalah sebesar Rp.585.070.727,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 596.350.000,- atau mencapai 98,11% anggaran terserap.

IKSK 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah pengujian nutrisi dan mutu pakan ikan. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan Hg), antibiotik (nitrofurantoin, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji dilaksanakan oleh BBPBL Lampung. Indikator pakan ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 12 Sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	12	31	258,33	-	-

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, capaian sampel pakan ikan air laut yang diuji sebesar 31 sampel atau sebesar 258,33% terhadap target tw IV sebesar 12 sampel yang capaiannya sama jika dibandingkan dengan target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator sampel pakan ikan air laut yang diuji merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Sampel pakan yang diuji di BBPBL Lampung pada TW IV ini mencapai 31 sampel. Realisasi sampel pakan yang diuji ini telah memenuhi target tahunan. Sampel pakan yang diuji berasal dari internal dan eksternal. Sampel internal yang diuji berupa bahan

baku dan pelet yang diproduksi oleh pabrik pakan mandiri BBPBL Lampung. Sedangkan sampel pakan eksternal berasal dari pokdakan dan/atau stakeholder lainnya.

Target dari sampel pakan yang uji telah terpenuhi, namun terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- a) Pengujian sampel pakan yang telah dilakukan tidak hanya spesifik pada pakan pabrikan ikan laut, namun juga dilakukan pada pakan pabrikan ikan tawar, pakan mandiri dan bahan baku pakan serta makanan olahan berbasis ikan sehingga untuk target yang ditentukan spesifik sampel pakan ikan laut hanya sedikit yang dapat dipenuhi;
- b) Harga reagen untuk pengujian sampel pakan cukup mahal sehingga diperlukan anggaran yang memadai serta perlunya alokasi biaya perawatan laboratorium karena peralatan sudah lebih dari 10 tahun belum pernah dilakukan perawatan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dari kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Perlunya anggaran yang memadai untuk biaya perawatan laboratorium untuk pengujian sampel pakan ikan;
- b) Perlunya anggaran yang memadai untuk biaya perawatan alat– alat yang digunakan untuk pengujian sampel pakan ikan.

Target pengujian sampel di BBPBL Lampung sudah terpenuhi, namun demikian pengujian sampel pakan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan (masyarakat).

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap di TW IV pada kegiatan sampel pakan yang diuji di Laboratorium BBPBL Lampung sebesar Rp. 6.044.000 atau 67,21% dari pagu Rp. 8.993.000.

IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI), Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, serta Petunjuk Teknis maupun Kajian yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan budi daya ikan air laut.

Target Rekomendasi Kebijakan yang akan dihasilkan pada Tahun 2025 sebanyak 6 (Rekomendasi Kebijakan). Rekomendasi kebijakan tersebut, yaitu: kajian teknis sebagai usulan pada Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan

Budi Daya, serta Petunjuk Teknis maupun Kajian. Target dan Realisasi Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut sebagaimana terlihat pada dibawah ini.

Tabel 18. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	6	6	100,00	-	-

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, capaian indikator kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut sebesar 6 rekomendasi kebijakan atau sebesar 100% terhadap target tw IV sebesar 6 rekomendasi kebijakan yang capaiannya sama jika dibandingkan dengan target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut merupakan indikator baru pada Timja Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pencapaian indikator ini didasarkan dari pentingnya penetapan Kebijakan tersebut dalam kegiatan Budi Daya. Pada Triwulan IV telah terbit sebanyak 6 (enam) kebijakan Tata Kelola bidang budi daya ikan air laut yaitu:

- 1) SK Dirjen tentang Tim Pengendalian Residu;
- 2) SK Dirjen tentang Penunjukan Laboratorium Acuan/Uji Residu;
- 3) Kepmen Ambang Batas Residu;
- 4) Rancangan PERMEN KP perubahan atas PERMEN KP No. 7/PERMENKP/2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- 5) Petunjuk Teknis Pendederan dan Pembesaran pada Modelling Budi Daya Lobster (*Panulirus* spp.); dan
- 6) Kajian Potensi Budi Daya Lobster di Indonesia.

Rancangan PERMEN KP perubahan atas PERMEN KP No. 7/PERMEN-KP/2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) sudah memasuki tahap Harmonisasi dengan K/L pada tanggal 6 Januari 2025 dan dalam proses diundangkan oleh Kementerian Hukum RI.

Usulan Petunjuk Teknis Pendederan dan Pembesaran pada Modelling Budi Daya Lobster (*Panulirus* spp.) sudah dilayangkan kepada Sesdtjen Perikanan Budi Daya melalui Nota Dinas Nomor 1194/DJPB.4/PB.220/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Dokumen terkait pencapaian indikator kinerja Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Laut dapat diakses pada <https://portal-repo.kkp.go.id/s/TataKelolaBudidayaLaut>.

Tidak terdapat kendala pada rencana aksi dalam mencapai indikator kinerja kebijakan tata Kelola bidang budidaya ikan air laut ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi untuk mencapai rencana aksi adalah tetap mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat terkait bidang budi daya ikan air laut sehingga dapat dibuat rekomendas-rekomendasi kebijakan yang bermanfaat dan tepat sasaran.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target yaitu dengan tetap melakukan koordinasi dengan pakar dan stakeholders terkait untuk menghasilkan draft kebijakan yang dibutuhkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran untuk menunjang tercapainya indikator tersebut dianggarkan sebanyak Rp. 1.291.864.000.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.285.836.339,- atau sekitar 99,53%% pada triwulan IV.

IKSK 11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Kegiatan monitoring penyakit ikan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya wabah di kawasan perikanan budi daya yang berpotensi mengancam pencapaian target produksi dan menghambat kelancaran perdagangan produk perikanan budidaya di dunia internasional. Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di 34 Provinsi dengan dukungan anggaran Tugas Pembantuan namun pada Tahun 2025, kegiatan ini didelegasikan di BPKIL Serang dengan target sampel monitoring ikan air laut sebanyak 70 sampel. Capaian IKK tersebut, hasil pengukurannya baru diketahui akhir tahun.

Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji merupakan sampel monitoring pasif dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan gejala penyakit yang ditemukan atau sesuai yang direncanakan/diminta bila tidak ada gejala penyakit. Sampel yang diambil tidak hanya terkait dengan komoditas ikan saja namun juga meliputi pakan, air dan sedimen yang juga dapat menjadi media pembawa penyakit ikan air payau. Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan.

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah sampel hasil kegiatan monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang dan diujikan di laboratorium. Target merupakan sampel hasil monitoring pada sentra-sentra budi daya ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang. Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 70 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	70	99	141,43	-	-

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 99 sampel atau mencapai 495%, terhadap target tw IV sedangkan capaian tahunan mencapai 141,43% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji merupakan indikator baru pada Timja Kesehatan Ikan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji telah dilaksanakan pengujian pada 99 sampel di BPKIL Serang, sampel berasal dari sampel pada saat uji lapang. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja monitoring sangat baik, selain mampu melampaui target juga mampu memberikan layanan yang baik dalam upaya memonitor keberadaan penyakit di kawasan budi daya. Monitoring penyakit merupakan langkah antisipatif untuk mencegah kehadiran wabah penyakit yang bisa berdampak buruk dan merugikan pembudidaya. Evaluasi sampel monitoring penyakit ikan air laut yang ada pada sentra budi daya di 34 provinsi dengan ruang lingkup pengujian mikrobiologi yang meliputi total bakteri, total vibrio, dan identifikasi bakteri.

Tabel 20. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang Triwulan IV Tahun 2025

No.	Laboratorium Pengujian UPT	Ruang Lingkup	Target Tahunan (Sampel)	Target TW IV (Sampel)	Realisasi TW IV (Sampel)	Capaian Tahunan (%)
1	BPKIL Serang	Monitoring Penyakit Ikan Air Laut	70	20	99	141,43
TOTAL			70	20	99	141,43

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 penyakit ikan air laut yang dilakukan monitoring antara lain *Vibrio sp.*, *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND), *Infectious Myonecrosis Virus* (IMNV), *Taura Syndrome Virus* (TSV), *White Spot Syndrome Virus* (WSSV), *Enterocytozoon Hepatopenaei* (EHP), *Salmonella sp.*, dan *Escherichia coli* dan berdasarkan hasil pengujian, penyakit ikan yang ditemukan positif adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Vibrio sp.*, sedangkan untuk penyakit lain yang dilakukan monitoring menunjukkan hasil negatif.

Secara realisasi sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji telah melebihi target tahunan yang ditetapkan namun selama pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu 1) UPT terkendala pada pengambilan sampel di lapangan karena adanya efisiensi anggaran sehingga lebih banyak melakukan monitoring pasif dan patogen yang diuji menjadi terbatas; 2) Data yang disampaikan oleh BPKIL Serang masih berupa angka lempeng total (ALT) dan matrik yang diuji masih berupa air laut; dan 3) Anggaran untuk indikator ini pada triwulan IV masih terblokir.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya yang diharapkan bisa dilaksanakan pada indikator Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji, yaitu 1) Laboratorium BPKIL Serang perlu menambah matrik pengujian seperti daging ikan dan/atau hewan laut lainnya dan diperlukan juga penambahan parameter pengujian selain angka lempeng total bakteri, parameter yang lebih fokus terhadap pengujian penyakit, 2) melakukan perencanaan kegiatan monitoring pada triwulan selanjutnya melibatkan pemerintah daerah (kolaborasi) dan 3) Memprioritaskan kegiatan monitoring penyakit ikan air laut pada sentra budi daya ikan dengan mengedepankan kerugian ekonomis yang dialami oleh pembudidaya ikan; dan 4) Memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan monitoring penyakit ikan air laut dapat berjalan optimal dan dapat melakukan monitoring secara aktif.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran sampai dengan TW IV pada Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang masih terblokir.

IKSK 12. Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji

Indikator Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target.

Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilans AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloxacin.

Target indikator kinerja sampel monitoring surveilans AMR yang diuji di Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 sebesar 75 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. Capaian Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	1.183	-	-	75	90	120,00	-	-92,39

Indikator Pengujian sampel monitoring Surveilans AMR yang diuji untuk komoditas ikan air laut dilaksanakan di 4 UPT- DJPB yaitu di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok, pada triwulan IV terdapat realisasi pengujian sampel AMR sebanyak 90 sampel atau sebesar 120% dari target triwulan IV dan tahunan sebesar 75 sampel.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji merupakan indikator baru ada Kembali di Timja Kesehatan Ikan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021, 2023 hingga 2024 sedangkan pada tahun 2022 terdapat realisasi 1.183 sampel, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 tidak dapat diukur, namun untuk kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 terdapat nilai -92,39%.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji telah dilaksanakan pengujian oleh BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok sehingga terealisasi sebanyak 80 sampel yang telah diuji. Selanjutnya terkait dengan sampel yang telah diambil, maka sampel tersebut akan dilakukan identifikasi bakteri guna mendapatkan isolat bakteri target. Apabila hasil identifikasi bakteri ditemukan bakteri target, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian Antimicrobial Sensitivity Test (AST) dengan menggunakan metode agar disk difusi. Metode ini bertujuan untuk menentukan apakah bakteri target sensitif, intermediate atau resisten terhadap antibiotik yang digunakan dalam pengujian. Hasil pengujian resistensi antimikroba akan diketahui pada akhir tahun.

Tabel 22. Rincian target dan realisasi sampel surveilans resistensi antimikroba Triwulan IV Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan IV	Prosentase (%)
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	26	32	123,08
2	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	16	19	118,75
3	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	16	17	106,25
4	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	17	22	129,41
Total		75	90	120

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
1	BBPBL Lampung	26	Kerapu	8	11
			Kakap	9	11

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
			Bawal	9	10
2	BPBL Batam	16	Kerapu	5	6
			Kakap	8	9
			Bawal	3	4
3	BPBL Lombok	16	Kakap	8	9
			Bawal	8	8
4	BPBL Ambon	17	Kerapu	4	4
			Kakap	4	8
			Kuwe	9	10
Total				75	90

Kegiatan Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) ikan air laut dilaksanakan di 4 (empat) UPT – Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target total tahunan yang ditetapkan sebanyak 75 sampel. Realisasi yang dicapai adalah 90 sampel atau perolehan capaian sebesar 120%. Hasil pengujian identifikasi dari 90 sampel didapatkan dari 3 komoditas ikan yang menjadi target pengambilan sampel, yaitu: Kerapu, Kakap dan Bawal.

Secara keseluruhan setiap UPT Ikan Laut sampel surveilans AMR telah melampaui target tahunan. Realisasi sampel surveilans AMR tertinggi dicapai oleh BPBL Ambon yakni sebesar 129,41% atau sebanyak 22 sampel dari target 17 sampel.

Kendala yang ada pada pencapaian Indikator tersebut pada triwulan IV ini yaitu tidak terdapat anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pengambilan sampel AMR karena adanya efisiensi anggaran.

• Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya yang diharapkan bisa dilaksanakan pada Indikator Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji, yaitu Memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada untuk sehingga pelaksanaan monitoring surveilans AMR dapat berjalan optimal.

• Realisasi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV pada Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji di masing masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 23.828.040,- (99,95%) dari pagu Rp. 23.839.000,-
- BPBL Ambon sebesar Rp. 15.538.000,- (100%) dari pagu Rp. 15.538.000,-
- BPBL Batam sebesar Rp. 14.619.000,- (99,97%) dari pagu Rp. 14.624.000,-
- BPBL Lombok sebesar Rp. 14.623.251 (99,99%) dari pagu Rp. 14.624.000,-

Anggaran yang sudah terealisasi untuk Indikator Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji adalah sebesar Rp. 68.608.291,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 68.625.000,- atau mencapai 99,98% anggaran terserap.

IKSK 13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Diseminasi adalah penyebaran ide, gagasan dan sebagainya. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah kegiatan pelatihan atau pembimbingan yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu.

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan Kegiatan yang dapat berupa Sosialisasi, Diseminasi dan Bimtek terkait kebijakan, program kerja, bantuan pemerintah, penerapan inovasi teknologi dan kompetensi dalam bidang Perikanan Budi Daya yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan tercapainya indikator kinerja tersebut diharapkan penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan baik, terimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya baik yang dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut ataupun yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. UPT yang memiliki indikator Kinerja Sosialisasi Kebijakan adalah Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang, Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, dan Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon. Target indikator kinerja Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya sebanyak 4.213 orang, untuk Direktorat Ikan Air Laut adalah sebanyak 3.841 orang dan untuk UPT sebanyak 372 orang.

• Capaian Kinerja

Capaian indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 23. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	4.213	4.399	104,41	-	-

Pada tabel diatas Realisasi Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya lingkup DJPB (Direktorat Ikan Air Laut dan UPT) sebesar 4.399 orang atau 104,41% dari target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Target indikator kinerja Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya sebanyak 4.213 orang, untuk Direktorat Ikan Air Laut adalah sebanyak 3.841 orang dan untuk UPT sebanyak 372 orang. Realisasi Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya TA 2025

No	Pelaksana	Target Tahunan (orang)	Capaian	
			Volume TW IV (orang)	Presentase Tahunan (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	3.841	3.980	103,6
2	BPBL Ambon	3	8	266,6
3	BPKIL Serang	100	100	100
4	BLUPPB Karawang	43	50	116,2
5	BPBAT Sungai Gelam	200	200	100
6	BBPBAT Sukabumi	26	61	234,6
Jumlah		4.213	4.399	104,4

Berdasarkan data diatas Direktorat Ikan Air Laut (103,6%), BPBL Ambon (266,6%), BLUPPB Karawang (116,2%) dan BBPBAT Sukabumi (234,6%) yang capaiannya melebihi target Tahunan, sedangkan untuk BPKIL Serang dan BPBAT Sungai Gelam capaiannya sama dengan target tahunan dan terealisasi 100%.

Sosialisasi Kebijakan dilakukan untuk memberikan informasi terkait kegiatan dan program kerja di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kepada seluruh stakeholder perikanan budi daya termasuk didalamnya adalah kegiatan yang masuk dalam kegiatan prioritas. Beberapa kegiatan yang telah disosialisasikan adalah kegiatan revitalisasi tambak pantura, pengelolaan budi daya lobster, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, dan bimbingan teknis budi daya dengan sistem bioflok

Kendala atas rencana aksi pada indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya adalah Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan antara lain yaitu a) Kejelasan output dan anggaran yang baru diperoleh pada

triwulan ke IV sehingga pelaksanaannya kurang maksimal; b) IKU Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya awalnya sudah dihilangkan kemudian dimunculkan kembali di awal bulan Desember sehingga kegiatan Sosialisasi Kebijakan/Bimtek/Diseminasi menjadi lebih sederhana dan tidak bisa melibatkan banyak unsur.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dari kendala yang dihadapi antara lain: a) Target output dan kejelasan anggaran sudah ditetapkan di awal tahun sehingga dapat disusun perencanaan untuk masing-masing triwulan; dan b) Apabila terdapat perubahan output dan anggaran agar dapat diinformasikan lebih awal dan tidak di akhir tahun.

Tindak lanjut yang telah dilakukan dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakannya indikator kinerja ini di triwulan iv dan telah melebihi target orang yang diberikan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV pada pada indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya di masing masing satker adalah sebagai berikut:

- Direktorat Ikan Air Laut sebesar Rp.3.812.992.488,- (99,28%) dari pagu Rp.3.840.750.000,-
- BPKIL Serang sebesar Rp.99.724.000,- (100%) dari pagu Rp. 99.724.000,-
- BLUPPB Karawang sebesar Rp. 0,- (0%) dari pagu Rp. 42.177.000,-
- BPBAT Sungai Gelam sebesar Rp.199.919.383,- (99,95%) dari pagu Rp.200.000.000,-
- BBPBAT Sukabumi sebesar Rp. 24.357.868,- (93,68%) dari pagu Rp. 26.000.000,-
- BPBL Ambon sebesar Rp. 0,- (0) dari pagu Rp. 0,- (Revisi Anggaran dalam rangka Pertukaran Blokir Efisiensi Anggaran (Kode A) Bantuan Pemerintah pada Ditjen Perikanan Budi Daya TA 2025).

Anggaran yang sudah terealisasi untuk Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya adalah sebesar Rp. 4.112.635.871,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.182.651.000,- atau mencapai 98,32% anggaran terserap.

IKSK 14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Klaster komoditas unggulan budidaya air laut berbasis kawasan merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berkaitan dengan komoditas laut dalam suatu kawasan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing, efisiensi produksi, dan nilai tambah bagi komoditas budidaya laut tersebut. Klaster komoditas unggulan budidaya air laut diharapkan dapat mendukung ketahanan

pangan dan menjadi komoditas ekspor. Pengembangan kluster budidaya laut dengan komoditas unggulan bertujuan meningkatkan produksi, efisiensi dan daya saing di pasar internasional.

Indikator Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan ini merupakan kegiatan Pembangunan Kluster komoditas unggulan ikan air laut berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh BLUPPB Karawang. Komoditas yang akan dikembangkan adalah kekerangan dengan membangun instalasi budi daya kekerangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Target indikator kluster komoditas unggulan air laut berbasis Kawasan sebesar 1 unit.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan sebagaimana pada Tabel 25.

Tabel 25. Capaian Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	1	1	100.00	-	-

Sesuai pada tabel 25 dapat dilihat bahwa indikator kluster komoditas unggulan air laut telah terealisasi sebanyak 1 unit atau sebesar 100% dari target tahunan 1 unit.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Kluster komoditas Unggulan air laut berbasis kawasan merupakan indikator baru pada Timja Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 1 (unit) kluster yang sudah dibangun. Pelaksanaan kegiatan Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Laut dilakukan oleh Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang dengan target utama berupa pengembangan produksi kekerangan.

Kegiatan dilaksanakan di Tandon Utama BINS (Budidaya Ikan Nila Salin), BLUPPB Karawang dan Tandon BUBK (Budidaya Ikan Berbasis Kawasan) Kebumen. Kegiatan

budidaya yang dilakukan adalah budidaya dengan sistem polikultur komoditas kerang darah (*Anadara granosa*), udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) dan ikan nila salin (*Oreochromis niloticus*). Wadah budidaya berupa tandon liner HDPE. Kepadatan awal penebaran kerang berkisar 1.000–2.000 spat/m² pada fase penebaran, diikuti *thinning* (penjarangan) hingga 200–700 ind/m² pada bulan-bulan berikutnya untuk mengurangi kompetisi dan meningkatkan laju pertumbuhan.

Sistem polikultur berpotensi mendapatkan manfaat ekologi dan produksi, namun hasil akhir produksi belum dapat dinilai karena kegiatan masih pada tahap pemeliharaan

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dari kegiatan ini antara lain: a) Diperlukan Monitoring berkala kualitas air, pengukuran laju pertumbuhan, mortalitas, dan pengelolaan input hingga masa panen untuk penilaian kinerja yang kuantitatif serta penerapan pencatatan terstruktur (*spreadsheet*) untuk setiap event pemantauan: jumlah sampel, bobot, panjang cangkang, mortalitas, dan parameter air; b) Menggunakan pedoman FAO dan SOP internal untuk prosedur depuration dan pengelolaan pascapanen jika hasil akan diperdagangkan segar; dan c) Melakukan sinkronisasi kebutuhan logistik tambahan (pompa, *paddlewheel*, laboratorium monitoring) dengan realisasi anggaran dan rencana pembelanjaan selanjutnya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan dalam pencapaian target pada Triwulan IV adalah melakukan inventarisasi kegiatan dan capaian progress Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan dengan BLUPPB Karawang.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 untuk pembangunan kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang sebesar Rp1.695.350.261,- atau sebesar 16,59% dari pagu sebesar Rp10.000.000.000,- (belum dipotong efisiensi). Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran pembangunan kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang berasal dari rupiah murni (APBN) dan penerimaan BLU.

Sedangkan saat ini kegiatan pembangunan kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang mendapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp8.292.360.000,- (82,92%).

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima. Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84 (Nilai).

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 26. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	58,05	81,55	84	84,45	100,54	3.55	16,34

Sesuai pada tabel 26 dapat dilihat bahwa indikator nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut telah terealisasi sebesar 84,45 atau sebesar 100,54% dari target tahunan 84.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024 dan 2025 diukur pada akhir tahun dan pada tahun 2023 pengukuran dilakukan pada saat SOTK lama di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan nilai capaian sebesar 58,05. Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut tahun 2024 sebesar 81,55 sedangkan pada tahun 2025 sebesar 84,45, berdasarkan data ini capaian nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 pertumbuhannya telah meningkat sebanyak 3.55% dari tahun 2024, lalu kenaikan rata-rata 2021-2025 sebesar 16,34% hal ini memperlihatkan peningkatan upaya untuk terus memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Direktorat Ikan Air Laut.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan II, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain: Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/> sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

Pada triwulan IV nilai PM SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya telah diterbitkan, nilai tersebut merupakan hasil dari jumlah dari nilai beberapa aspek yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 27. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Direktorat Ikan Air Laut	84,45	A
2	Direktorat Rumput Laut	85,20	A
3	Direktorat Ikan Air Tawar	84,75	A
4	Direktorat Ikan Air Payau	83,55	A
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	-	

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya, nilai Satker Direktorat Ikan Air Laut menempati urutan ketiga dengan nilai 84,45, sedangkan diurutan pertama ada Direktorat Rumput Laut dengan nilai 85,20 diikuti diurutan kedua Direktorat Ikan Air Tawar dengan nilai 84,75 dan nilai terendah didapat oleh Direktorat Ikan Air Payau sebesar 83,55 dan nilai tersebut tidak mencapai target nilai Eselon II yaitu sebesar 84, namun berdasarkan nilai diatas semua Direktorat mendapatkan predikat A yang menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas di masing-masing satker sudah sangat baik, sedangkan Direktorat Prasarana dan Sarana belum memiliki nilai karena merupakan Direktorat yang baru terbentuk saat perubahan SOTK di tahun 2025 ini sehingga belum dapat melakukan Penilaian Mandiri SAKIP.

Kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target indikator ini adalah petugas SAKIP kesulitan mencari dokumen dari 2 tahun sebelumnya karena adanya pergantian petugas SAKIP akibat purna tugas dan perubahan SOTK.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi untuk mencapai indikator kinerja adalah a) membuat rencana kinerja Direktorat Ikan Air Laut setiap tahun dengan sebaik-baiknya, b) melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya, c) mendokumentasikan segala dokumen yang berkaitan dengan penilaian mandiri SAKIP dengan baik dan mudah diakses, dan d) melaksanakan penilaian mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mencapai indikator kinerja adalah melakukan penyusunan dokumen kinerja lebih awal agar pengumpulan dokumen yang dilakukan setiap triwulan bisa tepat waktu dan dapat segera diupload dokumen tersebut ke aplikasi aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

IKSK 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin.

- 1) Indikator dimensi **kualifikasi** yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan

- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi **kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- 3) Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 4) Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 81 (Indeks).

• Capaian Kinerja

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 28. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
66,39	83,66	83,07	84,18	81	81,24	100,30	-3,49	463

Sesuai pada tabel 28 dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut telah terealisasi sebesar 81,24 atau sebesar 100,30% dari target tahunan 81.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Tahun Anggaran 2024 mencapai angka 84,18. Angka ini mencerminkan tingkat profesionalitas ASN yang cukup tinggi di akhir tahun berjalan.

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 diukur pada akhir tahun. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut, berdasarkan data ini capaian indeks profesionalitas ASN tahun 2025 telah terjadi penurunan pertumbuhan sebesar -3,49 dari tahun 2024, dan memiliki nilai kenaikan rata-rata yang cukup tinggi dari tahun 2021-2025 sebesar 463%, meskipun nilai indeks mengalami penurunan namun IP ASN Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 masuk dalam kategori “tinggi” dan Direktorat Ikan Air Laut tetap harus meningkatkan kembali nilai IP ASN di tahun berikutnya.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pada triwulan IV nilai indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya telah diterbitkan, nilai tersebut merupakan hasil dari pengukuran beberapa aspek yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

Tabel 29. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Indeks	Kategori
1	Direktorat Ikan Air Laut	81,24	Tinggi
2	Direktorat Rumput Laut	83,26	Tinggi
3	Direktorat Ikan Air Tawar	80,52	Sedang

No	Unit Kerja	Nilai Indeks	Kategori
4	Direktorat Ikan Air Payau	81,29	Tinggi
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	83,05	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya, nilai Satker Direktorat Ikan Air Laut menempati urutan keempat dengan nilai 81,24, sedangkan diurutan pertama ada Direktorat Rumput Laut dengan nilai 83,26 diikuti diurutan kedua Direktorat Prasarana dan Sarana dengan nilai 83,05, lalu diurutan ketiga ada Direktorat Ikan Air Payau dengan nilai 81,29 dan nilai terendah didapat oleh Direktorat Ikan Air Tawar sebesar 80,52 yang nilai tersebut hanya masuk ke kategori “sedang” sedangkan untuk Eselon II lain yang memiliki nilai >81 termasuk dalam kategori “tinggi”.

Kendala atas rencana aksi untuk mencapai indikator kinerja ini adalah masih ada pegawai yang memiliki nilai IP ASN yang masih rendah.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Pegawai Direktorat Ikan Air Laut dengan berfokus pada perbaikan nilai kinerja individu maupun unit kerja. Upaya tersebut akan didukung melalui peningkatan kompetensi pegawai, antara lain dengan mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja. Melalui langkah ini, diharapkan kinerja Direktorat Ikan Air Laut dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

IKSK 17. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- Entitas yang diperiksa oleh BPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
- Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Pengelola keuangan negara melaporkan Penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian

ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan. Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (%).

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 30. Capaian Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
63,60	100	100	-	100	100	100,00	-	11,45

Sesuai pada tabel 30. dapat dilihat bahwa indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Ikan Air Laut telah terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100% dari target tahunan 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan kembali pada tahun 2025 sehingga pertumbuhan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, sedangkan untuk kenaikan rata-rata 2021-2025 memiliki nilai sebesar 11,45%.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan persentase penyelesaian secara tuntas temuan LHP BPK TA 2025 terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2025.

Tabel 31. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	100
2	Direktorat Rumput Laut	100
3	Direktorat Ikan Air Tawar	100
4	Direktorat Ikan Air Payau	100
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	100

Berdasarkan tabel diatas semua Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya, mendapatkan nilai persentase sebesar 100% termasuk Satker Direktorat Ikan Air Laut. Namun yang memiliki temuan LHP BPK TA 2025 hanya Direktorat Rumput Laut yaitu sebesar Rp. 119.635.797 dan telah diselesaikan secara tuntas hingga mendapatkan nilai 100%, sedangkan untuk keempat Direktorat teknis Lainnya tidak memiliki Temuan di LHP BPK TA 2025.

Tidak terdapat kendala dalam rencana aksi untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

• **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut terhadap indikator kinerja ini adalah mengumpulkan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian temuan BPK yang ada di Satker Direktorat Ikan Air Laut jika memang ditemukan temuan tersebut oleh BPK.

IKSK 18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Ikan Air Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Laut yang menjadi objek pengawasan. Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 memilik target sebesar 85%.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Ikan Air Laut sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).

Capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 32. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
100	86,96	100	92,68	85	100	117,65	7,89	50,40

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut tercatat sebesar 100%. Angka ini melampaui target triwulan maupun target tahunan sebesar 85, dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 117,65%. Capaian ini mencerminkan optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Pada tahun 2024, capaian realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut mencapai 92,68% sedangkan pada Tahun 2025 mencapai 100%, dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 indikator ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,89% dan memiliki kenaikan rata-rata dari 2021-2024 sebesar 50,40%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kinerja Direktorat Ikan Air Laut dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen pada Tahun 2025 ini, selain itu dengan capaian ini menunjukkan kinerja pada tahun 2024 dan 2025 tetap menunjukkan hasil yang positif karena telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Sesuai Surat Inspektur III Inspektorat Jenderal Nomor T.841/ITJ.3/HP.550/XII/2025 tanggal 7 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perikanan Budi Daya (APBN dan PHLN), Direktorat Ikan Air Laut memiliki 3 temuan antara lain:

- 1) Pembayaran biaya transport belum dilengkapi bukti: Pada kegiatan Koordinasi Kegiatan AMDAL Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat dengan nilai hasil pemantauan Rp.64.347.000 keterangan hasil pemantauan belum dilengkapi Laporan Perjalanan Dinas.
- 2) Pembayaran belanja barang yang belum lengkap dokumen pembayarannya:
 - a. Pada Pekerjaan Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap II dengan nilai hasil pemantauan Rp.6.885.000 keterangan belum melampirkan kelengkapan dokumen biodata narasumber;
 - b. Pada Pekerjaan Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) Asistensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revitalisasi Tambak Pantura Jawa dengan nilai hasil pemantauan Rp.2.295.000 keterangan Belum melampirkan kelengkapan dokumen meliputi biodata narasumber, notulensi kegiatan, daftar hadir, dan undangan kegiatan dilengkapi susunan acara.

Pada triwulan IV ini ketiga temuan hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut sehingga realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker bisa mendapatkan nilai capaian sebesar 100%.

Tabel 33. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00
2	Direktorat Rumpuk Laut	94,59
3	Direktorat Ikan Air Tawar	93,75
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	98,28

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 pada level unit kerja, Direktorat Ikan Air Laut memiliki capaian tindak lanjut sebesar 100%, yang nilai

capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Direktorat lain di lingkup DJPB (Direktorat Rumpun Laut, Direktorat Air Tawar dan Direktorat Prasarana dan Sarana) dan capaiannya sama dengan Direktorat Ikan Air Payau. Hal ini menunjukkan bahwa satker Direktorat Ikan Air Laut sudah optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Ikan Air Laut.

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), yaitu dalam proses pertanggungjawaban pekerjaan baik secara teknis maupun administrasi harus mengikuti dan sesuai dengan peraturan yang ada.

IKSK 19. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari capaian rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 5 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur. Pengukuran dilakukan dengan target bobot pengukuran sebagai berikut:

- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 85%
- Pengelolaan BMN = 85%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

$$\text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} = \frac{\text{jumlah pengukuran terhadap 5 aspek}}{\text{jumlah aspek yang diukur}}$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut adalah 80 (%).

- **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut. Jumlah Pegawai Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang PNS, 4 (empat) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 5 (lima) orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah

pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada tahun 2025 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga.

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Ikan Air Laut mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2025. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat.

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Ikan Air Laut yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2025 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat.

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen:

- a) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- b) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- c) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 34. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
94,13	-	94,13	94,77	80	97,51	121,89	2.89	0.71

Realisasi Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 97,51% atau 121,89% dari target tahunan sebesar 80%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada tahun 2024 mendapatkan capaian sebesar 94,77% sedangkan pada tahun 2025 mendapatkan capaian sebesar 97,51% dari data tersebut dapat dilihat bahwa capaian pada Tahun 2025 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,89% dan nilai kenaikan rata-rata dari tahun 2021-2025 sebesar 0,71% hal ini menunjukkan semakin baiknya Direktorat Ikan Air Laut dalam meningkatkan layanan perkantoran pada Tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut diukur dari beberapa aspek yaitu: Kehadiran pegawai, Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN, Layanan tata usaha dan Pengelolaan SDM Aparatur dan belum terdapat kendala atas rencana aksi.

Capaian rencana aksi terhadap 5 Aspek untuk penilaian Persentase Layanan Perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan IV sebagai berikut:

- Kehadiran pegawai = 88,21%
- Pengelolaan Keuangan = 99,34%
- Pengelolaan BMN = 100%
- Layanan tata usaha = 100%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 100%

Berikut rumus perhitungan persentase layanan perkantoran yang akan menjadi realisasi Indikator kinerja:

$$\text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} = \frac{487,55}{5} \\ = 97,51\%$$

Sehingga berdasarkan perhitungan diatas didapatkan nilai persentase layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut sebesar 97,51%. Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini telah melebihi target namun dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini masih terdapat kendala yaitu data yang dikumpulkan harus menunggu pada hari terakhir kerja tahun 2025 sehingga pengumpulannya baru dapat dilaksanakan di awal tahun 2026.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut terhadap indikator kinerja ini adalah mengumpulkan data Kehadiran pegawai, Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN, Layanan tata usaha dan Pengelolaan SDM Aparatur dan belum terdapat kendala atas rencana aksi hingga periode pengukuran nanti di akhir tahun.

IKSK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut adalah 70 (nilai).

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 35. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	70	84,27	120,39	-	-

Realisasi Indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 84,27 atau 120,39% dari target tahunan sebesar 70.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penilaian oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Tabel 36. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Direktorat Ikan Air Laut	84,27	A (Memuaskan)
2	Direktorat Rumput Laut	73,52	BB (Sangat Baik)

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
3	Direktorat Ikan Air Tawar	79,18	BB (Sangat Baik)
4	Direktorat Ikan Air Payau	83.13	A (Memuaskan)
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	-	-

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya, nilai Satker Direktorat Ikan Air Laut menempati urutan pertama dengan nilai 84,27, sedangkan diurutan kedua ada Direktorat Ikan Air Payau dengan nilai 83,13 diikuti diurutan ketiga Direktorat Ikan Air Tawar dengan nilai 79,18 dan nilai terendah didapat oleh Direktorat Rumput Laut sebesar 73,52, sedangkan Direktorat Prasarana dan Sarana belum memiliki nilai karena merupakan Direktorat yang baru terbentuk saat perubahan SOTK di tahun 2025 ini sehingga belum dapat mengikuti penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh Biro Umum.

Nilai yang didapatkan oleh Direktorat Ikan Air Laut dan Direktorat Ikan Air Payau termasuk dalam kategori “A (Memuaskan)” dan Nilai yang didapatkan oleh Direktorat Ikan Air Tawar dan Direktorat Rumput Laut masuk kedalam kategori “BB (Sangat Baik)”. Berdasarkan kategori-kategori tersebut kinerja pengarsipan di lingkungan Eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini telah melebihi target namun dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini masih terdapat kendala yaitu masih terdapat pegawai yang belum memahami penulisan tata naskah yang benar.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut pada periode selanjutnya adalah a) dilakukan sosialisasi kembali kepada setiap pegawai Direktorat Ikan Air Laut terkait format yang benar dalam penulisan tata naskah, dan b) melakukan proses mendokumentasikan arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah dengan baik di Direktorat Ikan Air Laut.

IKSK 21. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level

1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Indikator Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Target tahunan Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut adalah sebesar 100 (%)

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja persentase penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 37. Capaian Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan				Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK				Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
Realisasi 2021-2024				2025			Pertumbuhan 2024-2025	Kenaikan Rata-Rata 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	-	-	100	100	100,00	-	-

Realisasi Indikator kinerja persentase penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 100% atau sebesar 100,00% dari target tahunan sebesar 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2021 hingga 2024, begitu juga dengan pertumbuhan 2024 hingga 2025 dan kenaikan rata-rata 2021 hingga 2025 tidak dapat dilakukan perhitungan..

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Tahun 2025 masih dalam tahap penyelesaian Identifikasi SOP dan dari proses identifikasi tersebut didapatkan 16 Bidang Kegiatan yang melibatkan Direktorat Ikan Air Laut dalam proses penyusunan draft SOP, bidang kegiatan tersebut antara lain:

1. Penetapan kawasan budi daya perikanan;

2. Pemanfaatan kawasan budi daya perikanan; (PIC)
3. Standardisasi bidang prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;
5. Evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;
6. Standardisasi bidang perbenihan;
7. Pemanfaatan plasma nutfah;
8. Pelestarian plasma nutfah;
9. Standardisasi bidang kesehatan ikan dan lingkungan budi daya; (PIC)
10. Pengendalian penyakit ikan;
11. Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR);
12. Pengendalian lingkungan budi daya; (PIC)
13. Rehabilitasi lingkungan budi Daya; (PIC)
14. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
15. Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada Ikan Budi Daya; dan
16. Standardisasi bidang produksi budi daya.

Pada Identifikasi SOP di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tersebut Direktorat Ikan Air Laut menjadi PIC dalam 4 Bidang Kegiatan dalam penyusunan SOP pada periode selanjutnya.

Tabel 38. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00
2	Direktorat Rumput Laut	100,00
3	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	100,00

Hasil pengukuran kinerja persentase penyelesaian identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Triwulan IV Tahun 2025 pada level Eselon II, Direktorat Ikan Air Laut memiliki capaian sebesar 100%, yang nilai capaiannya sama dengan 4 Direktorat lain di lingkup DJPB yaitu Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Rumput Laut, Direktorat Air Tawar dan Direktorat Prasarana dan Sarana. Hal ini menunjukkan bahwa satker Direktorat Ikan Air Laut sudah optimal dalam melakukan proses penyelesaian identifikasi SOP yang melibatkan Satker Direktorat Ikan Air Laut.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target dan dalam pelaksanaannya ini tidak terdapat kendala.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk periode selanjutnya adalah a) melanjutkan proses penyelesaian penyusunan draft SOP yang melibatkan Direktorat Ikan Air Lau dan b) menjalankan tugas PIC di bidang kegiatan yang ditunjuk dalam penyusunan draft SOP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 khususnya Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut adalah sebesar Rp.5.297.009.000,- dan tidak terdapat pagu blokir, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.5.297.009.000,-. Realisasi satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 khususnya Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut adalah sebesar Rp. 5.261.915.491,- atau sebesar 99,34% dari pagu efektif.

Bila dibandingkan, realisasi anggaran Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 menurun secara nilainya tetapi secara persentase naik bila dibandingkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,90%, akan tetapi bila realisasi anggaran dilihat secara rata-rata sejak tahun 2021 hingga 2025 sebesar 99,11%, Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Direktorat Ikan Air Laut tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2021-2025

Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Rata-Rata Realisasi (%)
2021	103.479.642.000	102.820.756.396	99,36	99,11
2022	303.292.980.722	303.591.945.372	99,96	
2023	241.619.089.000	240.179.852.808	99,40	
2024	205.879.263.000	200.700.543.719	97,48	
2025	5.297.009.000	5.261.915.491	99,34	

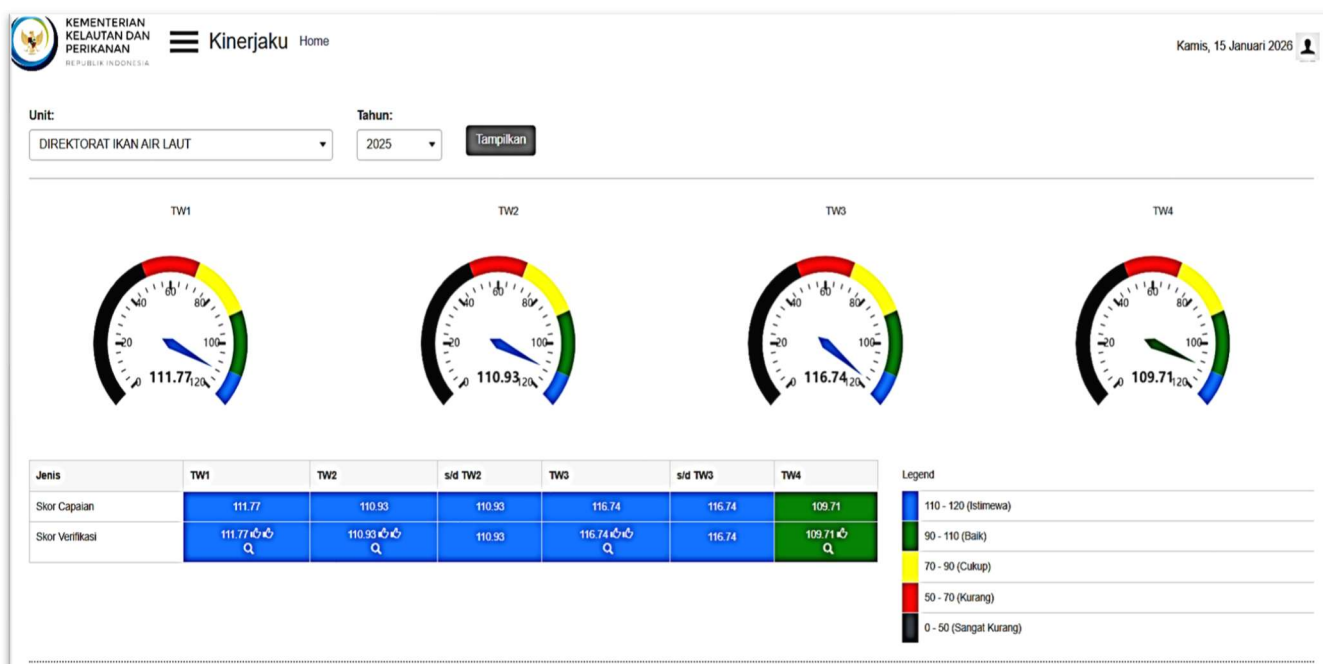
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Ikan Air Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Oktober s.d Desember 2025. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pendukung sasaran kegiatan, sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja telah melampaui target triwulan yang telah ditetapkan atau >100% dan terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut semua Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator tercapai. Seluruh capaian Indikator kinerja Tahun 2025 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada mencapai nilai **“BAIK”** dengan nilai **109,71**.



Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya ada hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No.	Hal Yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Dalam Penilaian Indeks Profesionalitas ASN masih ada pegawai yang memiliki nilai IP ASN yang masih rendah.	Mendorong ASN Direktorat Ikan Air Laut dengan berfokus pada perbaikan nilai kinerja individu maupun unit kerja dan mengembangkan Kompetensi ASN.
2.	Pada Penilaian PM SAKIP petugas SAKIP kesulitan mencari dokumen dari 2 tahun sebelumnya karena adanya pergantian petugas SAKIP akibat purna tugas dan perubahan SOTK.	Melakukan penyusunan dokumen kinerja lebih awal agar pengumpulan dokumen yang dilakukan setiap triwulan bisa tepat waktu dan dapat segera diupload dokumen tersebut ke aplikasi aplikasi ESR MenPan: https://esr.menpan.go.id/ maupun Kinerjaku: https://kinerjaku.kkp.go.id/ dan dokumen mudah ditemukan Ketika dibutuhkan.

LAMPIRAN

Kertas Kerja Verifikasi Triwulan IV

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
Bulan : Desember - 2025
NKO Awal : 109.71
NKO Verifikasi : 109.71

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.10	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Data Dukung1	Rekomendasi	Maximize	6,00	6,00	6,00	6,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
2	IKSK.11	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji Data Dukung1	Sampel	Maximize	70,00	20,00	99,00	99,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
3	IKSK.13	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Data Dukung1	Orang	Maximize	4.213,00	4.213,00	4.399,00	4.399,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
4	IKSK.14	Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan Data Dukung1	Unit	Maximize	1,00	1,00	1,00	1,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
5	IKSK.2	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT Data Dukung1	Ekor	Maximize	9.268,00	9.268,00	10.462,00	10.462,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
6	IKSK.22	Produksi Benih Ikan Air Laut dan Kepiting di UPT Data Dukung1	Ekor	Maximize	360.601,00	360.601,00	389.715,00	389.715,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
7	IKSK.23	Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT Data Dukung1	Ekor	Maximize	89,00	89,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
8	IKSK.24	Sampel Monitoring Surveilans AMR yang diuji Data Dukung1	Sampel	Maximize	75,00	75,00	90,00	90,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
9	IKSK.4	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Data Dukung1	Ekor	Maximize	1.217.027,00	1.217.027,00	1.434.850,00	1.434.850,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
10	IKSK.5	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1	Ekor	Maximize	174.574,00	174.574,00	175.000,00	175.000,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
11	IKSK.6	Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT Data Dukung1	Kg	Maximize	6.752,00	6.752,00	6.780,00	6.780,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
12	IKSK.7	Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPB) Data Dukung1	Unit	Maximize	9,00	9,00	51,00	51,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
13	IKSK.8	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Data Dukung1	Sampel	Maximize	1.931,00	282,00	7.449,00	7.449,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
14	IKSK.9	Sampel pakan ikan air laut yang diuji Data Dukung1	Sampel	Maximize	12,00	12,00	31,00	31,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Direktur Ikan Air Laut DJPB Nomor 55/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
15	IKSK.02.1	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Nilai	Maximize	84,00	84,00	84,45	84,45	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.4387/DJPB.1/TU.210/VII/2025 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
16	IKSK.02.2	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Indeks	Maximize	81,00	81,00	81,24	81,24	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026 Hal Capaian IKU *Persentase Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya tanggal 12 Januari 2026
17	IKSK.02.3	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.205/DJPB.1/KU.520/I/2026 Hal Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI tanggal 12 Januari 2026
18	IKSK.02.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	85,00	85,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.200/DJPB.1/TU.140/I/2026 Hal Capaian IKU *Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB* Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026
19	IKSK.02.5	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	80,00	80,00	97,51	97,51	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Kepala Subbag Tata Usaha Direktorat Ikan Air Laut Nomor 35/DJPB.4/TU.140/I/2026 Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Persentase Layanan Perkantoran Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2026
20	IKSK.02.6	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Nilai	Maximize	70,00	70,00	84,27	84,27	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.210/DJPB.1/TU.140/I/2026 Hal Capaian IKU *Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Budi Daya* tanggal 12 Januari 2026
21	IKSK.02.8	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.239/DJPB.1/OT.310/I/2026 Hal Capaian IKU Identifikasi SOP Lingkup Direktorat pada Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2026

Kesimpulan

Perwakilan Unit Kerja	Nama	Email	
	Aulia Sonida	tu.ditikanairlaut@gmail.com	Setuju
Tim Verifikasi	Nama	Email	
	Nur Amrina Rosidhah	tu.ditikanairlaut@gmail.com	Setuju
	Asrianti Eka Rahmadi	sakipdjpb@gmail.com	

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Ikan Air Laut



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut

Tb. Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sesditjen PB	
2.	Kepala Program	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	20
		2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037
		3. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89
		4. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489
		5. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574
		6. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927
		7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	23
		8. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976
		9. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17
		10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
		11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70
		12. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75
		13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000
		14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	11.156.622.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	358.000.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025		11.514.622.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut


Tb. Haeru Rahayu


Tinggal Hermawan

**Perjanjian Kinerja Revisi Kesatu Direktorat Ikan Air Laut
(Tanggal 08 April 2025)**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Kamil
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037
		2. Produksi Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89
		3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489
		4. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574
		5. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927
		6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CPIB, CBIB) (Unit)	16
		7. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976
		8. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17
		9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
		10. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70
		11. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75
		12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000
		13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	14. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84
		15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85
		18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70
		20. Persentase Penyelesaian SOP Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	6.554.122.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	358.000.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025		6.912.122.000

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil